

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Hamzah¹, Salman², Jusniaty³

¹²³Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: hamzahancha802@gmail.com; Salmanimm45@gmail.com; jusniaty@gmail.com

Abstract. This study aims to empirically describe the implementation of the duties and functions of hamlet heads (kepala dusun) in Era Baru Village, Tellulimpoe Sub-district, Sinjai Regency. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that hamlet heads actively engage in various activities, such as coordinating routine community service (kerja bakti), supervising concrete pavement projects, participating in important village meetings, and supporting training programs on organic fertilizer production. These roles highlight that the hamlet head functions not only as an administrative executor but also as a social mobilizer, development coordinator, and facilitator of community empowerment. Nevertheless, the execution of hamlet head duties still faces several challenges, including limited human resource capacity, restricted access to formal training, suboptimal internal coordination, and increasing public demands for better services and transparency. Supporting factors that enhance the performance of hamlet heads include active community participation through the tradition of mutual cooperation (gotong royong), support from the village head and other village officials, as well as local initiatives based on community potential. In contrast, inhibiting factors include the lack of adequate facilities and infrastructure, insufficient incentives compared to workload, and the absence of regular performance evaluation mechanisms. This study concludes that the success of hamlet heads in carrying out their duties is influenced by personal capacity, institutional support, and community participation. The practical implication of this research is the need to strengthen the capacity of hamlet heads through technical and managerial training, improved welfare, provision of adequate supporting facilities, and the implementation of performance evaluation systems tailored to local needs.

Keywords: Hamlet Head, Village Governance, Duties and Functions, Community Participation

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara empiris pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan aktif dalam berbagai kegiatan, antara lain koordinasi kerja bakti rutin, pengawasan pembangunan rabat beton, keterlibatan dalam rapat-rapat penting desa, serta dukungan terhadap pelatihan pembuatan pupuk organik. Peran ini menegaskan posisi kepala dusun tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak sosial, koordinator pembangunan, dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas kepala dusun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya akses terhadap pelatihan formal, koordinasi internal yang belum optimal, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor pendukung yang memperkuat kinerja kepala dusun meliputi partisipasi aktif masyarakat melalui tradisi gotong royong, dukungan kepala desa dan perangkat desa, serta adanya inisiatif lokal berbasis potensi masyarakat. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana dan fasilitas kerja, minimnya insentif dibandingkan beban kerja, serta ketiadaan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kepala dusun dipengaruhi oleh kapasitas personal, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas kepala dusun melalui pelatihan teknis dan manajerial, peningkatan kesejahteraan, penyediaan sarana penunjang, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Kepala Dusun, Pemerintahan Desa, Tugas dan Fungsi, Partisipasi Masyarakat

Received Sept 20, 2025; Revised 11 Oct 2025; Accepted 22 Oct 2025

*Hamzah, E-mail Address: hamzahancha802@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan entitas terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat. Desa tidak hanya menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 3 Tahun, 2024) tentang Desa, peran aparatur desa, termasuk kepala dusun, menjadi sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Kepala dusun merupakan salah satu perangkat desa yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat dusun. Ia bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dusun dan pemerintah desa serta memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, menengahi konflik, memfasilitasi program-program desa, dan membina kehidupan sosial masyarakat (Permendagri Nomor 84 Tahun, 2015). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kepala dusun memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif. Berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan teknis, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun.

Lebih lanjut, pelaksanaan tugas kepala dusun juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat, dukungan kepala desa, serta sistem administrasi yang berjalan di desa. menurut (Odelia, 2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas koordinasi antar lembaga, dan kemampuan individu dalam mengelola dinamika sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik. Sedangkan menurut (Hatala & Pattimura, 2023) menyatakan bahwa lemahnya pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa sering kali dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas aparatur dalam memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh. Tantangan ini berdampak pada kualitas pelayanan dan keberhasilan program-program pembangunan desa yang diinisiasi oleh pemerintah desa.

Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merupakan salah satu desa yang sedang aktif mendorong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam proses ini, kepala dusun memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik di tingkat dusun. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun di desa tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diteliti secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun di Desa Era Baru dilakukan, apa saja kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung kelancaran tugas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan *capacity building* kepala dusun dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari kepala desa, kepala dusun, perangkat desa lainnya, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengacu pada model (Huberman & Miles, 2014) Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode, guna memperoleh data yang akurat dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Empiris Pelaksanaan Tugas Kepala Dusun

Kerja Bakti Rutin di Setiap Dusun

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Era Baru, diketahui bahwa kepala dusun memiliki peran penting dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun. Pelaksanaan tugas ini mencerminkan fungsi strategis kepala dusun sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, serta sebagai penggerak partisipasi warga dalam pembangunan lokal. Adapun bentuk pelaksanaan tugas yang teridentifikasi meliputi kegiatan kerja bakti rutin, pengawasan pembangunan rabat beton di jalan tani, keterlibatan dalam rapat-rapat penting desa, dan partisipasi dalam pelatihan pembuatan pupuk organik.) masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (1993), yakni meningkatkan kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang memperkuat kerjasama antarwarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kerja bakti rutin yang dilaksanakan di setiap dusun, seperti membersihkan saluran air, memperbaiki fasilitas umum, dan melakukan penataan lingkungan, telah berjalan efektif dengan peran aktif kepala dusun sebagai koordinator. Peran kepala dusun tidak hanya sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai pemimpin informal yang mampu memobilisasi partisipasi warga. Hal ini sejalan dengan pandangan (Wahyuni, 2022) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak terlepas dari peran aktor lokal yang mampu membangun kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti juga dapat dikaitkan dengan teori partisipasi Arnstein 1969 Dalam (Ruf, 2025) yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam bentuk konsultasi, kemitraan, maupun kontrol komunitas. Dalam konteks ini, kepala dusun berperan sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi warga dan memastikan kegiatan dilaksanakan secara gotong royong.

Pelaksanaan Rabat Beton di Jalan Tani

Dalam kegiatan pembangunan rabat beton di jalan tani, kepala dusun berperan aktif dalam aspek pengawasan, koordinasi tenaga kerja lokal, serta distribusi material. Selain itu, kepala dusun juga bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjadi perantara antara pemerintah desa dengan warga. Hal ini menunjukkan implementasi fungsi manajerial kepala dusun, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins & Coulter dalam (Ginting, 2023) yang menekankan peran pemimpin lokal dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan

Secara empiris, kehadiran kepala dusun dalam proyek rabat beton mencerminkan prinsip *good governance* di tingkat lokal, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Pratama, 2022) yang menyebutkan bahwa keterlibatan aparat dusun dalam pengawasan proyek pembangunan desa dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, fungsi kepala dusun tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Rapat-Rapat Penting Desa

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala dusun secara aktif mengikuti rapat-rapat penting desa, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kepala dusun memiliki peran strategis sebagai penyampai aspirasi warga dusun masing-masing, sekaligus memberikan masukan dalam menetapkan program prioritas desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran kepala dusun sangat penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*) karena merekalah yang paling mengetahui kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya. Secara teoritis, keterlibatan kepala dusun dalam forum rapat desa dapat dianalisis menggunakan teori perencanaan partisipatif (*participatory planning*). Teori ini menekankan bahwa proses perencanaan yang melibatkan aktor lokal mampu menghasilkan keputusan yang lebih legitimate dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian (Farhan, 2025) menunjukkan bahwa musyawarah desa yang melibatkan kepala dusun lebih efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan, karena kepala dusun menjadi penghubung informasi antara tingkat rumah tangga dengan pemerintah desa.

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Keterlibatan kepala dusun dalam pelatihan pembuatan pupuk organik yang diinisiasi oleh warga menunjukkan dimensi pemberdayaan masyarakat. Meski tidak secara langsung sebagai penyelenggara, partisipasi kepala dusun dalam kegiatan tersebut memperlihatkan dukungan terhadap penguatan kapasitas warga dalam sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan konsep *community empowerment* yang dikemukakan oleh Perkins & Zimmerman Dalam (Lestari, 2021) di mana pemimpin lokal memiliki peran penting dalam mendorong keberdayaan masyarakat melalui dukungan moral, sosial, maupun kelembagaan.

Kegiatan ini juga mencerminkan upaya pemerintah desa untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pelatihan pupuk organik di tingkat desa tidak hanya meningkatkan keterampilan petani, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan kepala dusun dalam kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Tantangan Pelaksanaan Tugas Kepala Dusun

Meskipun kepala dusun di Desa Era Baru telah melaksanakan berbagai tugas dengan baik, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan peran mereka. Tantangan tersebut mencerminkan keterbatasan struktural maupun kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi kepala dusun sebagai ujung tombak pemerintahan desa. Adapun tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian kepala dusun belum memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai di bidang administrasi pemerintahan. Hal ini berdampak pada keterbatasan pemahaman mereka terhadap regulasi, kebijakan, maupun prosedur administratif yang berlaku. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketergantungan pada perangkat desa lain, khususnya sekretaris desa atau kepala urusan, dalam menyelesaikan urusan administrasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Sanjaya & Darma, 2023) yang menyebutkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Minimnya latar belakang pendidikan formal sering menjadi hambatan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip administrasi modern, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan menjadi kebutuhan mendesak bagi kepala dusun.

Kurangnya Akses terhadap Pelatihan Formal

Keterbatasan akses terhadap pelatihan aparatur desa juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur desa, faktanya pelatihan tersebut belum menjangkau semua kepala dusun secara merata. Dalam beberapa kasus, pelatihan hanya diikuti oleh perangkat inti desa, sementara kepala dusun yang berperan langsung di lapangan kurang mendapat kesempatan.

Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kemampuan kepala dusun dalam mengikuti perkembangan regulasi baru, penggunaan teknologi informasi desa, maupun strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut (Rosyid et al., 2021) keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, ketidakmerataan pelatihan menciptakan kesenjangan kompetensi di antara perangkat desa.

Koordinasi Internal yang Kurang Efektif

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara kepala dusun dan perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan (KAUR) dan kepala seksi (KASI), belum berjalan maksimal. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih peran dan kurangnya komunikasi efektif, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan administrasi.

Teori organisasi klasik yang dikemukakan oleh Fayol menekankan pentingnya fungsi koordinasi dalam memastikan efektivitas organisasi. Tanpa koordinasi yang baik, setiap unit kerja cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi (Zulfiani, 2018). Penelitian terbaru oleh (Dewi & Studi, 2024) juga memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa lemahnya koordinasi internal perangkat desa sering kali menjadi faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan program. Oleh karena itu, kepala dusun perlu lebih proaktif membangun komunikasi intensif dengan perangkat lain agar tercipta sinergi dalam pelayanan dan pembangunan desa.

Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kompleks

Masyarakat desa saat ini semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pelayanan publik, transparansi, serta efektivitas program pembangunan. Kepala dusun sering kali menjadi pihak pertama yang menerima aspirasi, keluhan, maupun kritik dari masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika harapan masyarakat tersebut tidak selalu sejalan dengan keterbatasan anggaran desa, infrastruktur, maupun fasilitas pendukung lainnya. Hal ini sejalan dikemukakan (Dr. Robin Pakudu, S.Sos., n.d.), di mana pemerintah

dituntut untuk tidak hanya melayani, tetapi juga mendengarkan, memberdayakan, dan merespons kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Tanpa kemampuan tersebut, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat berpotensi mengalami ketegangan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas kepala dusun di Desa Era Baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, sedangkan faktor penghambat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih optimal.

Faktor Pendukung

Partisipasi Aktif Warga Masyarakat

Tradisi gotong royong yang masih kuat di masyarakat Desa Era Baru menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala dusun. Gotong royong tercermin dalam kegiatan kerja bakti, pembangunan rabat beton, hingga pelatihan pembuatan pupuk organik. Partisipasi aktif warga ini sejalan dengan konsep social capital (modal sosial) yang dikemukakan oleh Putnam dalam (Syahra, 2025), di mana jaringan sosial, norma, dan kepercayaan masyarakat dapat memperkuat efektivitas pemerintahan lokal.

Dukungan Kepala Desa dan Pemerintah Desa

Hubungan harmonis antara kepala dusun dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sinergis. Dukungan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral, berupa arahan, motivasi, serta pembagian tugas yang jelas. Hal ini memperkuat koordinasi internal dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Menurut Robbins & Coulter (Dr. Rismansyah, SE., n.d.) kepemimpinan yang inklusif dan komunikasi yang baik antarunit organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja tim serta mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

Inisiatif Lokal

Adanya kegiatan seperti pelatihan pembuatan pupuk organik menjadi bukti adanya semangat inovasi dan kolaborasi masyarakat yang difasilitasi oleh kepala dusun. Inisiatif lokal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menunggu program dari pemerintah, tetapi juga berusaha menciptakan solusi berbasis potensi lokal. Dalam perspektif community-driven development (CDD), inisiatif masyarakat lokal merupakan kekuatan penting untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. (Setiani et al., 2025) menemukan bahwa program pelatihan berbasis kebutuhan lokal meningkatkan keberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Faktor Penghambat

Terbatasnya Fasilitas dan Sarana Penunjang Kerja

Beberapa dusun di Desa Era Baru belum memiliki kantor dusun atau perangkat kerja yang memadai, seperti peralatan administrasi dan teknologi informasi. Kondisi ini menyulitkan kepala dusun dalam menjalankan tugas administratif maupun pelayanan kepada warga. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan struktural yang kerap ditemui di banyak desa di Indonesia (Susilowati et al., 2024). Hal ini menunjukkan

perlunya perhatian dari pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas dasar bagi kepala dusun agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan efektif.

Minimnya Insentif dan Beban Kerja yang Tinggi

Honor kepala dusun yang relatif kecil tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks. Kepala dusun harus menjalankan fungsi administratif, koordinatif, sekaligus sosial kemasyarakatan. Menurut penelitian (Rohyani & Yulianti, 2021), rendahnya insentif sering berdampak pada motivasi kerja perangkat desa. Hal ini juga selaras dengan teori motivasi Herzberg yang menekankan pentingnya faktor ekstrinsik, seperti gaji dan insentif, untuk menjaga kepuasan kerja aparatur. Dengan demikian, perlu ada kebijakan yang lebih adil terkait insentif kepala dusun agar mereka memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan tugas.

Kurangnya Evaluasi Berkala

Penelitian juga menemukan bahwa tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja kepala dusun secara rutin menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Evaluasi kinerja yang bersifat sistematis seharusnya dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kepala dusun, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip performance management yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen peningkatan kinerja organisasi (Wirtadipura et al., n.d.).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai telah mencerminkan peran strategis mereka sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala dusun berperan aktif dalam berbagai aspek, mulai dari koordinasi kerja bakti rutin, pengawasan pembangunan rabat beton, keterlibatan dalam rapat-rapat desa, hingga dukungan terhadap inisiatif lokal seperti pelatihan pembuatan pupuk organik. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kepala dusun tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran sosial, manajerial, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa pelaksanaan tugas kepala dusun masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia karena latar belakang pendidikan yang belum memadai, kurangnya akses terhadap pelatihan formal, lemahnya koordinasi internal antarperangkat desa, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan transparansi program desa. Tantangan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan administrasi di tingkat dusun.

Lebih lanjut, faktor pendukung yang memperkuat kinerja kepala dusun antara lain partisipasi aktif masyarakat yang masih kental dengan tradisi gotong royong, dukungan harmonis dari kepala desa dan perangkat desa, serta adanya inisiatif lokal berbasis potensi masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas dan sarana kerja, minimnya insentif dibandingkan dengan beban kerja yang tinggi, serta tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja secara berkala.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kepala dusun sangat dipengaruhi oleh kapasitas personal, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Implikasi praktis yang dapat ditarik adalah perlunya kebijakan penguatan aparatur dusun melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan

manajerial, pemberian insentif yang lebih proporsional, penyediaan sarana penunjang yang memadai, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas. Dengan strategi tersebut, kepala dusun diharapkan dapat menjalankan perannya lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S., & Studi, P. (2024). *Strategi kinerja pengelolaan keuangan desa di kabupaten serdang bedagai*.
- Dr. Rismansyah, SE., M. S. (n.d.). *Manajemen Perubahan*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=GTYM EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Robbins+%26+Coulter+\(2018\),+kepemimpinan+yang+inklusif+dan+komunikasi+yang+baik+antarunit+organisasi+dapat+meningkatkan+efektivitas+kerja+tim+serta+memper&ots=x8A9w5iyw&sig=QhRbMc4fCrbZMXivs6pgb0uAAic&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=GTYM EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Robbins+%26+Coulter+(2018),+kepemimpinan+yang+inklusif+dan+komunikasi+yang+baik+antarunit+organisasi+dapat+meningkatkan+efektivitas+kerja+tim+serta+memper&ots=x8A9w5iyw&sig=QhRbMc4fCrbZMXivs6pgb0uAAic&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Dr. Robin Pakudu, S.Sos., M. S. (n.d.). *Sinergi Birokrasi : Membangun Pelayanan Publik yang efektif*. CV. Mega Pres Nusantara. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=a8pGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Denhardt+%26+Denhardt+\(2015\),+di+mana+pemerintah+dituntut+untuk+tidak+hanya+melayani,+tetapi+juga+mendengarkan,+memberdayakan,+dan+merespons+kebutuhan+masyarakat+&ots=IuUjXSEKnc&s](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=a8pGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Denhardt+%26+Denhardt+(2015),+di+mana+pemerintah+dituntut+untuk+tidak+hanya+melayani,+tetapi+juga+mendengarkan,+memberdayakan,+dan+merespons+kebutuhan+masyarakat+&ots=IuUjXSEKnc&s)
- FARHAN, A. M. (2025). PERAN KEPALA DUSUN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:>
- Ginting, H. J. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa(Bpd) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis). *Skripsi*.
- Hatala, R., & Pattimura, U. (2023). *Transformasi Digital di Pedesaan : Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat*. *18*(1), 104–125.
- Huberman, a. M., & Miles, M. B. (2014). Qualitative Data Analysis. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, *47*(Suppl 4), 3–16. <http://www.uk.sagepub.com/books/Book239534?siteId=sage-uk>
- LESTARI, N. N. K. (2021). *STRATEGI PEMBERDAYAAN RATATIA ROTAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI*. 167–186.
- Odelia, E. M. (2018). Pengembangan Kapasitas Organisasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, *6*(1), 1–8. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp943047242efull.pdf>
- Permendagri Nomor 84 Tahun. (2015). Permendagri No. 84 Tahun 2015. *Permendagri No. 84 Tahun 2015*, *151*, 10–17.
- Pratama, Y. N. (2022). *Program studi ilmu pemerintahan pekanbaru 2022*. 1–97.

- Rohyani, I., & Yulianti, T. L. (2021). Analisis Pengaruh Pembagian Kerja , Insentif , Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Perangkat Desa. *Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis (MIMB)*, 18(1), 89–98.
- Rosyid, A., Nasrullah, M., Aryani, A. T. D., Ismanto, K., Izza, M., & ... (2021). *Ekonomi Dan Kearifan Lokal “Petanglong.”* <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=pu1WEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=tradisi+nyadran%5C&ots=KX38QHMFZJ%5C&sig=pY9vziH9DSbX6aucKfNPIkGSIQk>
- Ruf, A. H. S. M. F. M. '. (2025). *UMUM DI KELURAHAN BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN* Arif Herman Saputro Muhammad Farid Ma ' ruf *SI Ilmu Administrasi Negara , Universitas Negeri Surabaya , muhammadfarid@unesa.ac.id Abstrak. 5.*
- Sanjaya, I. G. W., & Darma, G. S. (2023). Bali Smart Island: Smart City Implementation in Bali Province. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 203–215. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i2.17325>
- Setiani, R., Saputri, E., Ningrum, B. P., Rizky, A., Ilhami, A. S., & Sumarah, I. E. (2025). Pelatihan Pembuatan Permen Sehat Berbasis Buah Pepaya pada Kelompok PKK Kelurahan Seloharjo, Kabupaten Bantul, DIY. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 915–926. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1884>
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Tamsyah, I. (2024). Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Strukturasi: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 104–115. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3631>
- Syakra, R. (2025). MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1 SE-Articles), 1–22. <https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.256>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- WAHYUNI, D. A. S. R. I. U. S. R. I. (2022). *Catchment Area Pada Pemerintahan Daerah.* www.aahlimediapress.com
- Wirtadipura, D., Kurniasih, D., & Primagraha, U. (n.d.). *Manajemen kinerja dan kinerja organisasi: tinjauan sistematis.*
- Zulfiani, Z. (2018). *Bureaucratic Behavior In The Implementation Of The Program Autonomy Village In Pangkajene And Kepulauan District.* http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23259/1/18_PO800216301%28FILEminimizer%29.pdf